

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejatuhan presiden Soeharto, yang diawali oleh krisis moneter maupun ekonomi pada tahun 1997-1998, telah memberikan peluang untuk menata kembali kehidupan politik, ekonomi dan hukum. Tuntutan penataan kembali system politik, ekonomi dan hukum itulah dikenal sebagai tuntutan reformasi total atau menyeluruh. Namun demikian, perjuangan untuk tercapainya reformasi itu, tentu saja bukan suatu hal yang mudah sebab keberhasilannya sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat kita lebih khusus pemimpin-pemimpin politiknya bisa mengantisipasi tuntutan itu (Juri Ardiantoro F., 1999:17).

Kehidupan politik dipandang dari setiap aspeknya mengalami perkembangan yang sangat cepat dan hal ini tak pernah diduga sebelumnya. Salah satu di antara berbagai perkembangan dan perubahan yang sangat jelas adalah munculnya berbagai partai politik, baik partai politik Islam maupun partai politik nasional lainnya.

Kemunculan partai-partai Islam telah membangkitkan kembali wacana lama di antara pemikir dan intelektual muslim tentang sikap hubungan Islam dan politik. Derap langkah reformasi telah membawa iklim baru bagi kehidupan masyarakat Indonesia dalam segala bidang. Kungkungan politik yang selama ini membelenggu telah lumpuh tak berdaya. Partai-partai yang menjadi saluran aspirasi politik bangsa seakan-akan bangkit dan berupaya memperoleh dukungan legal masyarakat. Di

tengah arus transisi tersebut terjadilah perubahan yang sangat signifikan terhadap gerakan Islam di Indonesia. Gerakan pasca lengsernya orde baru ditandai oleh dua tipikal yakni struktural dan kultural. Tipikal pertama, ditandai dengan maraknya pendirian partai-partai Islam. Tipikal kedua, ditandai dengan menjamurnya sejumlah gerakan Islam (Khamani Zada, 2002:3).

Berbicara partai politik Islam, di dalamnya tentu berbicara tentang peran atau partisipasi Ulama dalam dunia politik. Di dalam organisasi Nahlatul Ulama (NU), kiai atau ulama dari dulu memainkan peran utama sebagai anggota Syuriah, satu-satunya majlis yang mempunyai hak untuk menjawab masalah-masalah keagamaan. Para aktivis lain berkumpul di dalam Tanfidziyah yang mengurus masalah yang tidak menyangkut Hukum Islam. Sejak kemerdekaan hingga tahun 1970-an, kedua Rais Am: Kiai Wahab Hasbullah dan kiai Bishri Syamsuri, telah memimpin NU tanpa memisahkan masalah politik dan Agama (Andree Feillard, 1999:359).

Sebenarnya, keterkaitan para ulama dengan politik bisa dilacak sejak kedatangan Islam ke Indonesia bahwa sejak Islam menjadi agama resmi orang Jawa, para penguasa harus berkompetisi dengan pembawa panji-panji Islam atau para ulama dalam bentuk hirarki kekuasaan yang lebih rumit. Sebab para ulama yang sepanjang hidupnya memimpin aktifitas kehidupan keagamaan juga telah memperoleh pengaruh politik (Zamakhsari Dhofier, 1982:56).

Menurut Ali Maschan Moesa (1999:3) keterlibatan para ulama dalam politik praksis yang cukup jauh pada masa penjajahan adalah merupakan bukti sejarah yang riil. Misalnya mereka ikut bergerilya dengan bergabung kedalam barisan Hizbullah-

Sabilillah yang sebagian besar komandannya adalah para ulama atau kiai, bahkan banyak pesantren yang menjadi markas barisan tersebut.

Pada masa kemerdekaan, keterlibatan ulama dalam kancah politik praktis masih terus berlangsung dan bahkan KH.A. Wahid Hasyim dari Tebu Ireng, Jombang, tercatat sebagai salah satu dari sembilan orang yang menandatangani keputusan diterimanya Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar negara. Begitu pula keterlibatan para ulama dalam partai NU ketika masih menjadi partai politik nampak masih besar dan intens, bahkan sampai saat ini walaupun NU sudah kembali ke Khittah 1926 masih banyak ulama NU yang melibatkan diri dalam bidang politik. (Ali Maschan Moesa, 1999:3-4).

Dalam hal keluarnya NU dari partai Masyumi dan berdiri sendiri sebagai partai politik (parpol), Mahrus Irsyam sebagaimana dikutip Ali Maschan Moesa (1999:4) menyatakan bahwa sumber pokok masalahnya adalah ketika majlis syuro yang dikuasai oleh para ulama tidak mempunyai wewenang menentukan lagi atas kebijakan partai, dan lembaga ini diposisikan sebagai dewan penasehat saja.

Pandangan ulama tentang politik dan partai politik pilihannya adalah objek penelitian yang sangat menarik. Karena ternyata ulama sebagai pemimpin agama juga kental dengan pergumulan politik. Ulama sebagai kelompok elit agama bisa berubah menjadi kelompok kepentingan agama yang bercorak modern. Dalam sistem-sistem Religio-politik tradisional, hirarki keagamaan mempunyai posisi vital. Sebagai kelompok elit yang sakral, wewenang dan legitimasinya diperlukan untuk

mengukuhkan otoritas raja-raja. Mereka bisa memaksakan kehendaknya kepada penguasa dengan menggunakan hak-hak prerogatif dan pengaruhnya.

Ali Maschan Moesa (1999:9) menyebutkan ada beberapa fenomena yang cukup mengedepan berkaitan dengan fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, karena peran dan fungsi utama ulama adalah mengajarkan agama, maka adanya fakta tentang keterlibatan para ulama menjadi wacana yang menarik. *Kedua*, sampai saat ini masih banyak ulama yang menjadi pengurus parpol. Demikian juga banyak diantara mereka yang menjadi anggota DPR/MPR, DPRD I dan DPRD II. *Ketiga*, para ulama yang selama ini yang dianggap masih tradisional dan stagnan oleh beberapa pihak, namun sampai saat ini mereka masih bisa bertahan dengan pengikut yang banyak. Fenomena ini merupakan tolak ukur bahwa mereka mampu bertahan dari gempuran arus perubahan, khususnya pada era globalisasi saat ini, bahkan mereka tetap eksis di tengah gempuran depolitisasi.

Sering di lupakan orang, bahwa politik itu memang juga hadir dalam dimensi ruang dan waktu. Karena itu dalam kehidupan masyarakat tidak ada satu sisi pun dari kehidupan ini yang steril dari politik, termasuk para ulama. Dan lebih menarik lagi, bahwa sebenarnya tidak ada batas hitam putih antara berpolitik atau tidak berpolitik.

Masyarakat kabupaten Sukabumi, termasuk para ulama NU di kabupaten Sukabumi yang mayoritas adalah pimpinan pondok pesantren ikut andil dalam berpolitik, seperti ikut sertanya mendirikan sebuah partai atau mendukung salah satu partai yang ada seperti pemberian suaranya dalam pemilu. KH. Hamdun Ahmad misalnya, beliau adalah salah seorang Ulama NU yang aktif dalam partai politik,

beliau pernah menjabat sebagai ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Pimpinan Cabang (DPC PKB) kabupaten Sukabumi tahun 1998-1999.

Setelah tumbangnya rezim orde baru, NU ikut serta mendirikan suatu partai politik. Partai politik yang di bidani oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini merupakan partai Islam dengan semangat *Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Basyariyah, Ukhuwah Wathoniyah*. Partai politik yang di deklarasikan oleh KH. Abdurrahman Wahid, KH. Ilyas Rukhiyat, KH. Munasir Ali, KH. Mukhlis Muzadi dan KH. Musthafa Bisri, Pada tanggal 23 juli 1998 di Ciganjur Jakarta selatan diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Berpijak dari spiritual agama, dan pemahaman keindonesiaan yang plural, PKB merupakan parpol yang mempunyai semangat kebangsaan yang demokratis dan terbuka dengan mengemban fungsi sebagai wadah berhimpun bagi setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal usul keturunan, suku golongan, agama dan profesi, sebagai salah satu wahana untuk meningkatkan pendidikan kesadaran dan partisipasi politik, juga sebagai sarana artikulasi dan pengakuan kepentingan-kepentingan rakyat dalam lembaga-lembaga politik (Sahar L Hasan, 1998:24).

Berdirinya PKB cukup menggugah semangat warga NU untuk menatap masa depan yang lebih cerah setelah 32 tahun menjadi kelompok yang di pinggirkan. PKB bukan sekedar lahirnya wadah baru penyaluran aspirasi politik warga NU, tapi juga menjadi parameter bagi soliditas politik organisasi sosial keagamaan yang berbasis masa di pesantren dan pedesaan.

AS Hikam (dalam Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, 1999:240) seorang peneliti LIPI mengemukakan bahwa, kelahiran PKB merupakan manifestasi dari keinginan sayap politik NU untuk membuat ormasnya menjadi salah satu kekuatan politik.

Selain PKB, di kabupaten Sukabumi ada beberapa partai yang mensinyalir mempunyai basis masa warga NU terutama pesantren-pesantren yang ada di kabupaten Sukabumi. Partai-partai tersebut dipimpin oleh ulama NU sendiri.

Pada sayap tradisional, jika pada pemilu 1995 lalu hanya ada satu partai NU, pada pemilu 1999 warga Nahdliyyin terpecah setidaknya kedalam empat partai: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pendirinya termasuk Abdurrahman Wahid; Partai Kebangkitan Umat (PKU) pimpinan Yusuf Hasyim; Partai Nahdlatul Umat (PNU) pimpinan Syukron Ma'mun dan Partai Solidaritas Uni Nasional (SUNI) pimpinan Abu Hasan (AM Fatwa, 2000: 16).

Menurut KH. M. Mudrikah di kabupaten Sukabumi ada dua partai dari partai-partai tersebut yang dapat menyaingi PKB dalam meraih massa NU sebanyak-banyaknya. Partai tersebut adalah PNU dan PPP walaupun PNU secara jelas terlepas dari PBNU tetapi para penggagasnya adalah tokoh NU yang loyalitas dan pengabdianya kepada NU tidak diragukan. Dengan demikian PNU tetap berpeluang memperoleh dukungan warga NU. Sedangkan PPP saat ini dipimpin oleh seorang kader NU Hamzah Haz, bahkan beliau memperkirakan bahwa warga NU di pesantren tidak akan berkiprah ke PKB karena masa NU di kenal sebagai tradisional PPP dan masih banyak tokoh NU yang ada di PPP. (Hasil wawancara 10 September 2003).

Dari Hasil pemilu 1999, ternyata PKB di kabupaten Sukabumi mampu berada pada keempat di bawah tiga partai lain yang sudah lama berkiprah pada masa orde baru yang sudah sarat dengan pengalaman dalam mengikuti pemilu. PKB di kabupaten Sukabumi masih bisa terkalahkan oleh partai-partai yang lainnya. Padahal PKB ini merupakan partai yang berbasis Islam, yang mana dalam melakukan strategi politiknya sudah dapat dipastikan partai ini bisa memenangkan pemilu kemaren dikabupaten Sukabumi, apalagi bila dilihat bahwa mayoritas masyarakat kabupaten Sukabumi adalah umat Islam, lebih khususnya warga NU. Dapat dilihat dari perolehan suara pemilu tahun 1999 ternyata PKB kabupaten Sukabumi menduduki posisi ke-4 dari 48 jumlah partai yang ada. Bisa dilihat dalam table jumlah perolehan suara partai politik kabupaten Sukabumi:

No	Nama Partai	Jumlah	Presentase	Keterangan
1	PIB	2379	0,23	
2	KRISNA	901	0,09	
3	PNI	3881	0,37	
4	PADI	4598	0,44	
5	KAMI	2090	0,20	
6	PUI	4991	0,48	
7	PKU	1632	0,16	
8	MASYUMI BARU	1577	0,15	
9	PPP	244241	23,53	Posisi Ke-3
10	PSII	7720	0,74	Posisi ke-10
11	PDI-PERJUANGAN	256979	24,76	Posisi ke-2
12	PAY	2068	0,20	
13	PKM	1418	0,14	
14	PDKB	1199	0,12	
15	PAN	28028	2,70	Posisi ke-5
16	PRD	503	0,05	
17	PSII 1905	11264	1,09	Posisi ke-8
18	PKD	169	0,02	
19	PILAR	285	0,03	

20	PARI	365	0,04	
21	MASYUMI	5093	0,49	
22	PBB	17265	1,66	<i>Posisi ke-6</i>
23	PSP	428	0,04	
24	PK	15795	1,52	<i>Posisi ke-7</i>
25	PNU	4875	0,47	
26	PNI FRONT MARHEIN	3076	0,30	
27	IPKI	3335	0,32	
28	REPUBLIK	1455	0,14	
29	PID	1099	0,11	
30	PNI MASA MARHEIN	3108	0,30	
31	MURBA	944	0,09	
32	PDI	3460	0,33	
33	GOLKAR	329102	31,71	<i>Posisi ke1</i>
34	PP	8329	0,80	<i>Posisi ke-9</i>
35	PKB	46762	4,51	<i>Posisi ke-4</i>
36	PUDI	1654	0,16	
37	PBN	643	0,06	
38	MKGR	2102	0,20	
39	PDR	1032	0,10	
40	CINTA DAMAI	608	0,06	
41	PKP	6002	0,58	
42	SPSI	524	0,05	
43	PNBI	1787	0,17	
44	PBI	732	0,07	
45	SUNI	581	0,06	
46	PND	950	0,09	
47	PUMI	275	0,03	
48	PPI	495	0,05	
TOTAL		1037819		

Sumber Data: Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan (PDP3P) BAPPEDA Kabupaten Sukabumi.

Menurut K. M. Fudholi, PKB bukan sekedar lahirnya wadah baru penyaluran aspirasi politik warga NU di kabupaten Sukabumi, tetapi juga menjadi parameter bagi soliditas politik organisasi sosial keagamaan yang berbasis massa dipesantren dan pedesaan, perolehan suara dalam pemilu dan posisi PKB dalam percaturan politik

dapat menjadi cermin kesadaran kolektif warga Nahdliyyin kabupaten Sukabumi dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kehadiran ini tidak saja memperkaya panggung politik Indonesia tetapi juga menjadi tolak ukur sejauh mana ikatan-ikatan cultural yang menjadi andalan perekat kesadaran kolektif itu mengejawantah kedalam gerakan politik di era yang sudah berubah (wawancara 11 September 2003).

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, penulis memformulasikan penelitian ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Apa yang menjadi landasan Ulama NU kabupaten Sukabumi memilih PKB di kabupaten Sukabumi ?
2. Bagaimana Strategi dan usaha yang dilakukan Ulama NU Kab. Sukabumi dalam pemenangan PKB di kabupaten Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui landasan Ulama NU kabupaten Sukabumi memilih PKB di kabupaten Sukabumi
2. Untuk mengetahui strategi dan usaha yang dilakukan Ulama NU kab.Sukabumi dalam pemenangan PKB.

D. Kerangka Pemikiran

Perilaku politik umat Islam secara keilmuan dituntun oleh fiqh *Siyasah*, yakni sebuah ilmu yang membahas tentang politik, baik politik ekonomi, sosial, maupun dalam konteks bernegara atau pemerintahan. Sementara itu, pengertian A. Djazuli, politik merupakan upaya mengurus kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan umat sesuai dengan tuntunan syara'.

Konsep yang tegas tentang tujuan syari'at demi kemaslahatan itu adalah *maqashid al-syari'ah* yang terdiri dari atas lima hal, yaitu (1) memelihara Agama; (2) memelihara akal; (3) memelihara jiwa; (4) memelihara keturunan; dan (5) memelihara harta kekayaan. Lima tujuan ini dibangun oleh tiga kebutuhan manusia yang bersifat *dharuriyah* (primer), *hajiyyah* (tertier), dan *tahsiniyah* (komplementer). (A. Djazuli, 2000:52).

Konteks utama dalam pemeliharaan tersebut apabila dikaitkan dengan *siyasah dusturiyah* adalah *siyasah* yang menyangkut rakyat, negara dan pemerintah serta berbagai mekanisme berbangsa dan bernegara, adalah upaya perlindungan terhadap hak-hak masing-masing individu memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak yang paling fundamental bagi manusia adalah hak asasi yang menurut Abdul Qadir Audah meliputi empat hal, yaitu:

- (1). Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya;
- (2). Perlindungan terhadap kebebasan pribadi;
- (3). Kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan;serta
- (4).Terjamin kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membedakan kelas kepercayaan. (A. Djazuli, 2000:59).

Empat hal di atas, bagi Abdul Qadir Audah, adalah hak persamaan dan hak kebebasan berfikir, beraqidah, berbicara, berpendidikan, dan hak memiliki. Setiap hal itu dilengkapi oleh kewajiban bagi negara, rakyat, dan pemerintah, serta kebebasan berpendapat dibangun atas dasar etika yang benar menurut hukum.

Siyasah dusturiyah, menurut Al mawardi, membicarakan tujuh inti dari pembahasannya, yakni berkaitan dengan hal-hal berikut: (1) persoalan rakyat, status dan hak-haknya; (2) *imamah* hak dan kewajibannya; (3) *waliyul ahdi*; (4) *baiat*; (5) perwakilan; (6) *wizaroh* dan perbandingannya; serta (7) *ahlul hal wal aqdi*.

Dalam merealisasikan perilaku politik diatas, ditentukan oleh prinsip-prinsip dasar siyasah dusturiyah; (1) ketauhidan; (2) kemanusiaan; (3) keadilan; (4) persamaan; (5) pengawasan; (6) tanggung jawab; dan (7) tolong-menolong. (A. Djazuli 2000: 52).

Prinsip-prinsip diatas didasarkan pada dalil-dalil yang diambil dari al Qur'an, hadits dan produk ijtihad. Dalil-dalil ijtihadiyah yang dijadikan sandaran berujung pada kaidah sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan”. (Imam Musbikin, 1999:124).

Salah satu upaya untuk merealisasikan kemasalahatan tersebut adalah dengan pendekatan politik dakwah sebagaimana di sebutkan dalam al Qur'an Surat An nahl : 125 yaitu:

١٢٥- ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين

125- “Serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik sesungguhnya tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNYA dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (Soenarjo dkk 1998:421)

Cara mengajak yang baik dan benar ditunjukkan nabi melalui hadits sebagai berikut :

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان

“Barangsiapa diantara kalian melihat ke\munkaran hendaklah mnegubah dengan tanganya jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka hendaklah dengan hatinya, itulah selemah lemahnya iman”. (diriwayatkan oleh muslim No.78 (49) kitab al Iman).

Kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan adalah salah satu hak asasi yang menurut Abdul Qadir audah adalah salah satu hak yang paling fundamental. Sebagai umat Islam wujud dari menyatakan pendapat dan keyakinan sudah selayaknya menggunakan aspirasi politik itu. Salah satu wadah untuk menyalurkan aspirasi politik adalah dengan melalui partai politik. Menurut Sgmun Neuman yang dikutip oleh Miriam Budiardjo (1986:162) partai politik adalah organisasi politik dari aktifis-aktifis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta

merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau dengan golongan-golongan yang lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Pada pemilu 1999 terjadi polarisasi yang menimbulkan dua kutub penggolongan partai-partai peserta pemilu, yaitu partai yang berbasis agama dan partai nasionalis sekuler. Diantara partai yang berbasis agama tersebut adalah partai-partai Islam. Partai politik Islam adalah partai yang dipimpin oleh tokoh Islam, memakai asas Islam maupun bukan Islam sebagai fundamen partai dan orientasi partai yang terbuka dan tertutup, yang menerima anggota dari berbagai kalangan dan hanya menerima anggota dari kalangan Islam saja dan berusaha meraih simpati untuk merebut suara dari kalangan Islam sebagai basis utama dukungan.

Pandangan ulama NU kabupaten Sukabumi dalam memilih partai politik merupakan wujud dari taat kepada pemimpin. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 tentang taat kepada pemimpin:

١٥٩ - يا ايها الذين امنوا اطيع الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم
 فان تنازعتم في شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم
 الاخر قل ذلك خير واحسن تاويلا

- 59- “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan Ulil Amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya”. (Soenardjo, dkk., 1998: 128).

Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam perjalanan sejarahnya Ulama menjadi motivator dan juga penggerak bagi perkembangan masyarakat, tidak hanya pada persoalan-persoalan spiritual atau keagamaan semata tetapi juga pada persoalan-persoalan sosial, budaya dan sejak masa reformasi terjun ke beberapa persoalan-persoalan politik. Terbukti dengan ikut ambil bagian beberapa Ulama-ulama besar ke beberapa partai politik yang sejak tumbangnya orde baru marak menyuarakan aspirasi yang mengatasnamakan Umat Islam.

Namun tidak terlepas dari sekelumit uraian di atas Ulama berasal dari bahasa Arab yang artinya “orang-orang yang mengerti, atau orang-orang yang berpengetahuan” Ulama ialah muslim yang beriman, berilmu dan beramal. Yaitu yang imannya kuat ilmunya padat dan amalnya hebat (A.K Basuni,1976:21).

Secara spesifik ulama diartikan sebagai orang-orang alim yang sarat dengan ilmu keIslaman, yang secara karikaturis di gambarkan sebagai sosok kiai bersorban atau berkopiah dengan sejumlah kitab di tangannya dan tak jarang dianggap mempunyai karisma ritualistik, termasuk mereka yang sering dijuluki Ustadz (Panjimas, xxxv:65).

NU sebagai organisasi yang memiliki masa dan antusias yang besar dari masyarakat baik itu masyarakat pedesaan atau juga perkotaan. Meskipun fakta menunjukkan massa terbanyak NU berasal dari sekitar pulau Jawa dan Madura. NU di dirikan pada tanggal 31 januari 1926 di Surabaya, sesuai dengan namanya Nahdlatul Ulama (Organisasi kebangkitan para Ulama) dalam mekanisme program kerjanya

lebih mengutamakan pemeliharaan tradisi keagamaan kaum Ulama dari dulu sampai dengan sekarang. Selain itu pula NU senantiasa memelihara dan mengapresiasi nilai-nilai atau tradisi yang ada dimasyarakat, sehingga tradisi tersebut tidak perlu dibongkar sebelumnya tetapi perlu diubah atau di selaraskan dengan ajaran Islam (Khaerul Fathoni dan M.Zein, 1992: iv). Organisasi NU kerap kali di juluki dengan Organisasi tradisional, walaupun term tradisional yang diartikan dengan ketertinggalan dan anti perubahan sebenarnya ini tidak tepat dengan konteks Ulama NU saat ini.

Ulama-ulama yang ada di kabupaten Sukabumi biasanya begitu mendapatkan penghormatan dan penghargaan yang lebih dari para pengikutnya, yang akhirnya dari sekian banyak pengikut tersebut dalam konteks kehidupan bernegara di sebut dengan istilah "massa". Massa yang berada di balik Ulama-ulama ini akhirnya dirasakan perlu mendapatkan wadah sebagai tempat penyalur aspirasi massa dan masyarakat. Akhirnya didirikanlah beberapa organisasi-organisasi Islam yang bernaung pada azas Islam dan kekuatan Islam.

Menurut KH. Hamdun Ahmad, pada sayap tradisionalis, jika pada pemilu 1955 lalu hanya ada satu partai NU, pada pemilu 1999 warga Nahdliyyin termasuk di kabupaten Sukabumi terpecah setidaknya kedalam 4 partai, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pendirinya termasuk Abdurrahman Wahid; Partai Kebangkitan Umat (PKU) pimpinan Yusuf Hasyim; Partai Nahdlatul Umat (PNU) pimpinan KH. Syukron Ma'mun dan Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI) pimpinan Abu Hasan.(hasil wawancara 12 September 2003).

Lebih lanjut KH. Hamdun Ahmad mengemukakan mayoritas ulama NU kabupaten Sukabumi menaruhkan pilihannya kepada PKB, karena PKB dilahirkan dan difasilitasi oleh PBNU.(Wawancara 12 September 2003).

Untuk memenangkan partai politik pilihannya, dalam hal ini PKB, para ulama NU kabupaten Sukabumi memiliki strategi dan usaha dalam pemenangan PKB di kabupaten Sukabumi. Menurut A. Heuken SJ. (1989:149) strategi merupakan suatu Rencana jangka panjang atas koordinasi dari banyak tindakan demi tercapainya suatu tujuan.

Strategi yang ditetapkan ulama NU kabupaten Sukabumi dalam pemenangan PKB yaitu: *Silaturahmi*, *Silatufikri* dan *Silatul amal*. Ketiga bentuk strategi ini dalam tradisi NU merupakan bentuk komunikasi politik.

Untuk memperoleh dukungan rakyat, para ulama NU kabupaten Sukabumi berusaha menyampaikan seluk beluk mengenai partai pilihannya (PKB) secara terbuka kepada rakyat, dan proses ini dinamakan sosialisai politik. Sosialisasi politik adalah Sebuah proses dimana seorang individu bisa mengenali system politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. (Michael Rush dan Philip Althoff, 1995:22).

Dalam proses sosialisasi politik diperlukan komunikasi antara partai dengan rakyat terutama ulama NU kabupaten Sukabumi dengan masyarakat kabupaten Sukabumi.. tahap inilah yang merupakan awal dari keterlibatan rakyat dalam

partisipasi politik. Pada kenyataannya partisipasi politik ini bisa berupa keterlibatan atau bisa berbentuk ketidakterlibatan.

Bentuk partisipasi ini dapat spontan sifatnya. Akan tetapi lebih besar kemungkinannya. Partisipasi tersebut telah di organisir oleh partai-partai politik atau kelompok kepentingan sebagai bagian dari kegiatan politik mereka. selanjutnya Michael Rush dan Philip Althof (1995:22) mengemukakan bahwa kegiatan pemberian suara dalam pemilu dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal yang akan terhenti jika pemberian suara telah terlaksana. Sedangkan bentuk partisipasi politik yang dilakukan masyarakat menurut David f. Roth dan Frank L. Wilson sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo (1986:6) adalah seorang pengamat yang merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang dapat melakukan partisipasi politiknya dengan cara menghadiri rapat umum, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media massa dan memberikan suara dalam pemilihan umum (pemilu).

Pemilihan umum adalah lembaga demokrasi untuk mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. dalam kaitan ini pemilihan umum tidak hanya merupakan manifestasi berlakunya asas kedaulatanrakyat dalam kehidupan bernegara, tetapi juga berperan sebagai wadah untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah (Indria Samego, 1998:39). Pada kebanyakan peristiwa pemilihan terdapat persaingan yang langsung antara beberapa partai karena mayoritas pemilih mengidentifikasi dirinya dengan suatu partai.

Aturan bagi kehidupan sosial politik masyarakat muslim menurut 6 ulama NU kabupaten Sukabumi yang dijadikan sumber data (wawancara 10-12 September 2003) adalah *Amar ma'ruf nahi Munkar*. Mengenai hal ini Allah SWT berfirman dalam Surat Ali Imran ayat 104:

١٠٤ - وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

104- “ Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (Soenardjo, dkk., 1998:93).

Dari segi ini politik merupakan sarana untuk melaksanakan perintah Allah dalam menyeru kepada kebajika, menyeru kepada yang *ma'ruf* dan mencegah kemunkaran. Sebagai konsekwensi logisnya jalan yang ditempuh harus menggunakan jalan yang benar berdasarkan etika

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang di tempuh untuk mendapatkan data dan fakta dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode penyelidikan yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan penyelidikan dengan tehnik wawancara. Adapun tujuan penelitian ini untuk menggambarkan

bagaimana pandangan ulama NU kabupaten Sukabumi dalam memilih PKB di kabupaten Sukabumi, yakni tentang landasannya memilih PKB; strategi dan Usahanya dalam pemenangan PKB di kabupaten Sukabumi.

2. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kualitatif ,yaitu hasil dari wawancara dengan ulama NU kabupaten Sukabumi yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Berdasarkan Emis kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Barat bidang pendidikan Agama Islam tahun 1998-1999 bahwa jumlah pondok Pesantren di Kabupaten Sukabumi berjumlah 256 dari 45 kecamatan. Dalam Penelitian ini penulis mengambil sampel dari lima kecamatan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Sumber data primer, yaitu data-data yang di peroleh dari para Ulama NU yang memilih PKB di Kab. Sukabumi. Ulama-ulama tersebut antara lain:
 1. KH. Abdullah Muhtar (kecamatan Sukabumi)
 2. Drs. KH. A. Azis Masthuro (kecamatan Cisaat)
 3. Drs. KH. Hamdun Ahmad (kecamatan Cisaat)
 4. KH. M. Mudrikah (kecamatan Sukabumi)
 5. K. M. Anshori Fudholi (Cimanggu kecamatan Jampang Kulon)
 6. Drs.Ridwan Subagja (Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Sukabumi)
 7. Dadang Tarwan S. Ag. (kecamatan Kadudampit)
 8. Drs. Imam Syamsudin (kecamatan Cibadak)

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Seperti : Majalah, Bulletin, Internet dan buku-buku lain

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview atau wawancara dengan tujuan memperoleh informasi yang faktual untuk menafsir dan menilai keterangan dari key Informan (Informasi Kunci) seperti dari pandangan beberapa Ulama mengenai Landasan, srtategi dan usahanya dalam partisipasi politiknya terhadap kemenangan PKB.
2. Studi Kepustakaan, yaitu penulis menelaah buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Analisis Data

Data-data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan *Content Analysis* (analisis isi). Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data ini adalah:

- a. Pengumpulan Data
- b. Kualifikasi Data
- c. Penarikan kesimpulan hasil penelitian.